



KOMPARASI PELAPORAN DANA BOS DIGITAL DI SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA: *LITERATURE REVIEW*

Latifur Rahmi ¹, Leny Nurdiyaningsih ², Nyi Nyoman Sekar Sudesmi ³, Juliana ⁴,
Sonny M.Ikhsan Mangkuwinata ⁵, Saiful Bahri ⁶

Program Magister Administrasi Pendidikan, Fakultas Pascasarjana, Universitas Almuslim,
Bireun, Aceh, Indonesia ^{1,2,3,4,5,6}

e-mail: Lathifahceudahtat@yahoo.co.id, lenynurdiyaningsih.spd@gmail.com
lisasekarbali@gmail.com, juliana123.ja945@gmail.com, sonnymim@umuslim.ac.id
saifulbahri@umuslim.ac.id

Diterima: 21/9/2026; Direvisi: 1/10/2026; Diterbitkan: 9/8/2026

ABSTRAK

Pembiayaan pendidikan merupakan komponen penting dalam mendukung keberlangsungan dan mutu penyelenggaraan pendidikan, termasuk melalui pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang efektif, transparan, dan akuntabel. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi pengelolaan dan pelaporan dana BOS melalui sistem digital, seperti Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) dan BOS *Online*. Namun, penggunaan sistem digital yang relatif sama diterapkan dalam konteks kelembagaan sekolah negeri dan swasta yang memiliki karakteristik pengelolaan, pengawasan, dan sumber pembiayaan yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengomparasikan pelaporan dana BOS berbasis digital pada sekolah negeri dan swasta berdasarkan hasil penelitian terdahulu. Penelitian menggunakan pendekatan analisis literatur dengan desain deskriptif-komparatif terhadap 20 artikel ilmiah yang relevan. Literatur diseleksi secara sistematis melalui basis data bereputasi dengan kriteria inklusi dan eksklusi, kemudian dianalisis secara deskriptif, tematik, dan komparatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa sekolah negeri memiliki mekanisme pelaporan digital yang lebih formal, kaku, dan terstandar karena keterikatan hierarkis terhadap pengawasan dinas pendidikan. Sebaliknya, sekolah swasta menunjukkan fleksibilitas operasional yang lebih adaptif tetapi menghadapi tantangan akuntabilitas ganda kepada pemerintah dan badan penyelenggara yayasan. Meskipun sistem digital meningkatkan efisiensi administrasi, keberhasilan implementasi pada kedua jenis sekolah sangat ditentukan oleh kompetensi sumber daya manusia, literasi digital, kesiapan infrastruktur, dan efektivitas pengendalian internal.

Kata Kunci: *Akuntabilitas, ARKAS, Dana BOS, Pelaporan Digital, Sekolah Negeri dan Swasta*

ABSTRACT

Educational financing represents an essential component in supporting the sustainability and quality of education delivery, particularly through the effective, transparent, and accountable management of School Operational Assistance (BOS) funds. Information technology advancements have accelerated the transformation of BOS fund management and reporting through digital mechanisms, such as the School Activity and Budget Plan Application (ARKAS) and BOS *Online*. Nonetheless, identical digital platforms operate within distinct public and private institutional contexts characterized by differing managerial structures, supervisory frameworks, and funding sources. This study aims to analyze and compare digital-based BOS fund reporting in public and private schools synthesized from previous empirical



findings. Employing a literature review approach with a descriptive-comparative design, this study examined 20 relevant peer-reviewed articles. Literature was selected through systematic database searches adhering to explicit inclusion and exclusion criteria, followed by descriptive, thematic, and comparative analyses. The findings reveal that public schools exhibit more formal, rigid, and standardized digital reporting mechanisms due to direct hierarchical oversight from local education authorities. Conversely, private schools demonstrate greater operational flexibility but face dual accountability obligations to both the government and private foundation boards. Although digital platforms significantly enhance administrative efficiency, implementation success across both sectors remains heavily contingent upon human resource competencies, digital literacy, infrastructural readiness, and internal supervisory controls.

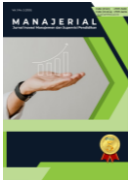
Keywords: *Accountability, ARKAS, BOS Funds, Digital Reporting, Public and Private Schools*

PENDAHULUAN

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu pilar penentu mutu dan kelangsungan proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar dan menengah. Ketersediaan alokasi finansial yang memadai memungkinkan pihak sekolah untuk melengkapi sarana prasarana, mendanai kegiatan operasional, serta meningkatkan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan. Tata kelola keuangan sekolah tidak hanya berfokus pada penerimaan dan pemanfaatan likuiditas dana semata, melainkan melibatkan siklus perencanaan, pengalokasian anggaran, pencatatan transaksi, pengawasan berkala, hingga pelaporan pertanggungjawaban publik. Dalam lanskap pendidikan di Indonesia, dana BOS menjadi instrumen transfer fiskal strategis pemerintah pusat dalam meringankan beban biaya operasional sekolah (Andriani et al., 2025; Mangkuwinata et al., 2026). Pengelolaan dana BOS yang tertib dan taat asas menuntut adanya sinkronisasi yang ketat antara Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dengan bukti fisik realisasi belanja riil di lapangan (Nurlaili et al., 2026; Nurlisma et al., 2026).

Transformasi teknologi informasi modern telah mengubah paradigma tata kelola administrasi keuangan satuan pendidikan dari sistem manual menuju ekosistem digital. Pengelolaan dana BOS saat ini diwajibkan memanfaatkan peranti lunak terintegrasi, seperti ARKAS, BOS *Online*, serta platform pembelanjaan daring pemerintah. Penerapan digitalisasi ini membuka peluang akselerasi dalam mewujudkan keterlacakan data transaksi belanja, simplifikasi pengarsipan dokumen, serta penguatan transparansi penggunaan anggaran (Mubarok et al., 2025). Bukti empiris dari Setiyono et al. (2025) menunjukkan bahwa pemanfaatan ARKAS pada jenjang SMP negeri mampu menciptakan mekanisme pembukuan dana BOS yang lebih teratur, rapi, dan terstandar. Di samping itu, integrasi pelaporan keuangan digital terbukti mempercepat proses verifikasi data administratif oleh dinas pendidikan setempat (Grediani et al., 2024; Wulandari et al., 2025).

Secara ideal, penerapan platform pelaporan digital diharapkan mampu mereduksi potensi penyimpangan serta mendorong terwujudnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Transparansi menuntut ketersediaan akses data bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*), sementara akuntabilitas menuntut tanggung jawab legal atas setiap rupiah dana publik yang dibelanjakan (Nadir & Karim, 2025; Ramadhan et al., 2026). Kendati demikian, digitalisasi administrasi belum sepenuhnya menjamin terciptanya transparansi substantif kepada masyarakat luas. Riset Batubara et al. (2025) mengonfirmasi bahwa efektivitas ARKAS dalam meningkatkan akuntabilitas publik sangat bergantung pada ketatnya pengendalian internal sekolah. Bahkan, keterbukaan informasi anggaran pada sekolah yang telah menerapkan



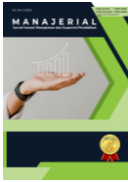
sistem digital sering kali masih terbatas pada pemenuhan syarat administratif internal instansi pembina (Nailah et al., 2025).

Urgensi komparasi pelaporan dana BOS digital menjadi semakin relevan apabila ditinjau dari disparitas konteks kelembagaan antara sekolah negeri dan swasta. Sekolah negeri beroperasi di bawah garis komando birokrasi pemerintah daerah dengan regulasi anggaran yang ketat, pengawasan berlapis dari inspektorat, serta ketergantungan dominan pada subsidi pemerintah (Aprilita & Saptantinah, 2025; Syifa, 2025). Di sisi lain, sekolah swasta memiliki garis koordinasi ganda yang melibatkan dinas pendidikan dan badan penyelenggara yayasan, serta ditopang oleh diversifikasi sumber pendanaan mandiri seperti iuran peserta didik (Bakti, 2020; Hakim & Suhendar, 2020). Perbedaan kultur manajerial, struktur otoritas, dan keleluasaan pembelanjaan ini secara langsung memengaruhi cara masing-masing sekolah mengadopsi platform digital yang sama. Akibatnya, standardisasi sistem dari pemerintah pusat kerap berbenturan dengan dinamika operasional internal di tingkat satuan pendidikan.

Berbagai riset mutakhir mengindikasikan bahwa keberhasilan adopsi sistem digital keuangan sekolah dipengaruhi secara simultan oleh kesiapan ekosistem kelembagaan. Faktor-faktor determinan tersebut mencakup tingkat literasi digital operator, komitmen kepemimpinan kepala sekolah, stabilitas infrastruktur jaringan internet, serta pengawasan internal yang berkesinambungan (Fadlika et al., 2024; Rusmiyati et al., 2025). Pada sekolah dengan kapasitas sumber daya manusia yang terbatas, adopsi ARKAS sering kali memicu beban administratif tambahan bagi guru yang merangkap tugas sebagai bendahara sekolah (Dewi, 2025; Fitri et al., 2023). Hal ini menegaskan bahwa digitalisasi tata kelola pembiayaan bukan semata-mata persoalan instalasi peranti lunak, melainkan rekayasa tata kelola kelembagaan secara menyeluruh.

Meskipun kajian mengenai pemanfaatan dana BOS telah banyak dipublikasikan, mayoritas riset terdahulu masih berfokus pada analisis parsial pada satu entitas sekolah atau satu wilayah geografis tertentu. Kajian yang membedah perbandingan langsung antara sekolah negeri dan swasta lebih banyak menyoroti efektivitas alokasi belanja umum tanpa menghubungkannya dengan platform digitalisasi pelaporan (Hakim & Enjelita, 2025; Pranisma Salsa Imeldania et al., 2026). Selain itu, kajian komparatif yang mensintesis riset-riset empiris di berbagai wilayah Indonesia menjadi sebuah tinjauan literatur terpadu masih sangat terbatas. Celah penelitian inilah yang melandasi pentingnya pelaksanaan studi tinjauan kepustakaan sistematis ini.

Nilai kebaruan dari kajian ini terletak pada perumusan sintesis komparatif yang memetakan dinamika pelaporan dana BOS berbasis digital antara sekolah negeri dan swasta melalui analisis 20 artikel ilmiah mutakhir. Penelitian ini tidak bermaksud memberikan penilaian dikotomis mengenai keunggulan salah satu jenis sekolah, melainkan mengungkap bagaimana perbedaan struktur organisasi membentuk efektivitas penerapan sistem digital. Kajian ini ditujukan untuk memberikan pemahaman holistik mengenai persamaan, perbedaan, kendala struktural, serta faktor kunci keberhasilan pelaporan digital. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengomparasikan praktik pelaporan dana BOS berbasis digital pada sekolah negeri dan swasta ditinjau dari dimensi efisiensi, transparansi, akuntabilitas, karakteristik kelembagaan, serta faktor pendukung dan penghambatnya.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis literatur (*literature review*) berdesain deskriptif-komparatif. Desain ini diterapkan untuk mengidentifikasi, membandingkan, dan mensintesis bukti-bukti empiris mengenai pelaporan dana BOS berbasis digital pada sekolah negeri dan swasta di Indonesia. Prosedur pencarian literatur dilakukan secara komprehensif melalui basis data bereputasi, meliputi *Google Scholar*, Garba Rujukan Digital (Garuda), DOAJ, serta jurnal terakreditasi SINTA. Kata kunci pencarian yang digunakan mencakup kombinasi istilah: "dana BOS", "pelaporan digital", "ARKAS", "BOS Online", "transparansi", "akuntabilitas", "sekolah negeri", dan "sekolah swasta". Kriteria inklusi yang ditetapkan adalah: (1) artikel jurnal ilmiah terbit dalam rentang tahun 2020–2026, (2) fokus pembahasan mencakup tata kelola, efektivitas, atau digitalisasi dana BOS, dan (3) menyajikan data empiris terkait sekolah negeri dan/atau swasta di Indonesia. Kriteria eksklusi meliputi prosiding tanpa penelaahan sejawat, artikel opini populer, skripsi/tesis/disertasi yang tidak dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, serta artikel dengan data metodologi yang tidak lengkap.

Tahapan penelusuran literatur diawali dengan proses identifikasi (*identification*) yang berhasil menjaring sebanyak 148 artikel yang relevan dengan tema pembiayaan pendidikan. Pada tahap penyaringan awal (*screening*), dilakukan eliminasi terhadap 62 artikel karena duplikasi data dan ketidaksesuaian judul serta abstrak dengan fokus pelaporan digital. Selanjutnya, sebanyak 86 artikel dievaluasi kelayakannya (*eligibility*) secara menyeluruh dengan menelaah teks lengkap (*full-text review*). Dari tahap telaah mendalam tersebut, sebanyak 66 artikel dikeluarkan karena hanya membahas isu pembiayaan makro tanpa menyinggung instrumen digitalisasi atau karakteristik satuan pendidikan sekolah. Pada tahap akhir inklusi (*included*), terpilih 20 artikel ilmiah primer yang memenuhi seluruh kriteria untuk dianalisis dan diekstraksi ke dalam matriks sintesis literatur.

Proses analisis data dilaksanakan secara bertahap melalui tiga pendekatan analitis, yakni analisis deskriptif, analisis tematik, dan analisis komparatif. Analisis deskriptif digunakan untuk memetakan distribusi sebaran tahun publikasi, letak geografis penelitian, jenjang pendidikan, serta metodologi yang digunakan dalam 20 literatur terpilih. Analisis tematik diterapkan untuk mengelompokkan pola temuan ke dalam kluster tema utama: adopsi sistem digital, efisiensi administrasi, akuntabilitas pelaporan, transparansi publik, serta kendala teknis operasional. Selanjutnya, analisis komparatif dijalankan untuk mengidentifikasi konvergensi dan divergensi tata kelola pelaporan dana BOS digital antara sekolah negeri dan swasta. Triangulasi teoretis diterapkan dengan membandingkan temuan empiris antarartikel guna memastikan objektivitas, validitas interpretasi, dan ketepatan sintesis akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Proses penyeleksian pustaka secara ketat menghasilkan 20 artikel ilmiah primer yang merepresentasikan dinamika implementasi pelaporan dana BOS digital di berbagai wilayah Indonesia. Literatur yang terpilih mencakup rentang jenjang pendidikan dasar hingga menengah dengan variasi status kelembagaan sekolah negeri dan swasta. Rangkuman metadata, objek amatan, serta fokus utama dari keseluruhan literatur yang dianalisis disajikan secara sistematis pada Tabel 1 berikut:



Tabel 1. Karakteristik Literatur Empiris yang Dianalisis

No.	Penulis Tahun	dan Lokasi Penelitian	Objek / Status Sekolah	Fokus Utama Kajian
1.	Setiyono et al. (2025)	Majalengka, Jawa Barat	SMP Negeri	Pemanfaatan ARKAS dan keteraturan tata kelola BOS
2.	Anggina et al. (2024)	Bandung, Jawa Barat	SMA Negeri	Manajemen keuangan, skala prioritas, dan ARKAS
3.	Hakim & Suhendar (2020)	Provinsi Banten	SMK Negeri dan Swasta	Komparasi manajerial dan efisiensi alokasi dana BOS
4.	Grediani et al. (2024)	D.I. Yogyakarta	Satuan Pendidikan Dasar/Menengah	Standardisasi prosedur pelaporan BOS berbasis ARKAS
5.	Andriani et al. (2025)	Magelang, Jawa Tengah	Madrasah Ibtidaiyah	Evaluasi model pembiayaan pendidikan dan dana BOS
6.	Wulandari et al. (2025)	Aceh Utara, Aceh	SMA Negeri	Efektivitas BOS <i>Online</i> dalam mendorong transparansi
7.	Bakti (2020)	Aceh Tamiang, Aceh	SD Negeri dan Swasta	Efektivitas pendayagunaan anggaran BOS antar-status
8.	Fitri et al. (2023)	Aceh Tamiang, Aceh	SMA Negeri	<i>Good school governance</i> dan transparansi dana BOS
9.	Hasmawati et al. (2021)	Aceh Barat Daya, Aceh	SMP Negeri	Manajemen BOS dalam menunjang mutu pembelajaran
10.	Yusra et al. (2021)	Aceh Utara, Aceh	Sekolah Dasar	Partisipasi pemangku kepentingan dalam pelaporan BOS
11.	Dewi (2025)	Aceh Tenggara, Aceh	SMP dan MTs Negeri	Sistem pengendalian internal dan akuntabilitas BOS
12.	Fadlika et al. (2024)	Aceh Tengah, Aceh	SD Negeri	Kepemimpinan manajerial kepala sekolah dalam dana BOS
13.	Firmansyah et al. (2024)	Bireuen, Aceh	Instansi Pembina / BPKD	Pengaruh pelatihan terhadap akuntabilitas pelaporan
14.	Putri (2025)	Nasional (Indonesia)	Madrasah Swasta & Negeri	Alokasi anggaran BOS dan dinamika pembiayaan



15.	Nurlisma et al. (2026)	Nasional (Indonesia)	Sekolah Dasar	Tata kelola pembiayaan dalam peningkatan mutu belajar
16.	Nurlaili et al. (2026)	Nasional (Indonesia)	Satuan Pendidikan	Urgensi manajemen pembiayaan bagi standar pendidikan
17.	Marliana et al. (2025)	Komparatif Internasional	Satuan Pendidikan	Model komparasi pembiayaan negara maju dan berkembang
18.	Mangkuwinata et al. (2025)	Nasional (Indonesia)	Lembaga Pendidikan	Analisis model pendanaan dan efektivitas belanja sekolah
19.	Mangkuwinata et al. (2026)	Nasional (Indonesia)	Satuan Pendidikan	Keterkaitan manajemen pembiayaan dengan mutu sekolah
20.	Munawwarah et al. (2026)	Nasional (Indonesia)	Satuan Pendidikan	Inovasi pembiayaan berbasis peranti teknologi informasi

Sumber: Hasil ekstraksi data literatur penelitian (2026)

Berdasarkan Tabel 1, sebaran artikel yang dianalisis mencerminkan diversitas metodologis dan kontekstual yang memadai untuk penarikan sintesis komparatif. Literatur yang berfokus pada teknologi spesifik seperti ARKAS dan BOS *Online* dominan meneliti aspek ketepatan prosedur administrasi dan pelaporan belanja. Sementara itu, literatur yang menelaah tata kelola makro memberikan fondasi analitis mengenai keterkaitan pengendalian internal dengan akuntabilitas kelembagaan sekolah. Keragaman objek amatan pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah memperkaya pemetaan komparatif tata kelola antara entitas sekolah negeri dan swasta.

Berdasarkan sintesis data dari 20 literatur tersebut, ditemukan perbedaan mendasar pada pola adaptasi pelaporan digital antara sekolah negeri dan swasta. Perbedaan ini berakar pada struktur birokrasi, mekanisme pertanggungjawaban legal, serta komposisi anggaran yang dikelola oleh masing-masing entitas pendidikan. Perbandingan menyeluruh mengenai praktik pelaporan dana BOS berbasis digital pada kedua jenis sekolah tersebut disajikan pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Komparasi Pelaporan Dana BOS Digital pada Sekolah Negeri dan Swasta

Dimensi Analisis	Karakteristik Sekolah Negeri	Karakteristik Sekolah Swasta	Sintesis Perbandingan
Kepatuhan Sistem	Mengikuti regulasi teknis kementerian dan dinas secara rigid.	Mengadopsi sistem regulasi dengan integrasi mekanisme yayasan.	Keduanya patuh pada sistem nasional, namun sekolah swasta memiliki kanal pelaporan ganda.
Prosedur Administrasi	Sangat terstandar, formal, dan dipandu petunjuk teknis negara.	Bervariasi mengikuti kebijakan yayasan dan kesiapan manajerial.	Standardisasi pelaporan lebih seragam dan ketat pada sekolah negeri.

Mekanisme Pengawasan	Pengawasan hierarkis oleh dinas pendidikan, inspektorat, dan BPK.	Pengawasan dilakukan oleh dinas pendidikan internal auditor yayasan.	Sekolah swasta menghadapi pengawasan ganda (regulator dan badan pengelola).
Fleksibilitas Anggaran	Terbatas pada kode rekening dan juknis BOS yang kaku.	Memiliki ruang penyesuaian belanja antarsumber dana mandiri.	Sekolah swasta memiliki fleksibilitas realokasi anggaran operasional yang lebih tinggi.
Transparansi Informasi	Berfokus pada pemenuhan audit administratif pemerintah.	Melibatkan akuntabilitas kepada yayasan dan orang tua murid.	Transparansi publik sekolah negeri sering terbatas pada papan pengumuman sekolah.
Kapasitas SDM Operator	Memiliki tenaga fungsional administrasi khusus yang terlatih.	Sering merangkap tugas antara tenaga pengajar dan bendahara.	Kesiapan sumber daya manusia sekolah negeri relatif lebih stabil dibanding swasta.
Efisiensi Digital	Terdorong oleh integrasi sistem data tunggal ARKAS.	Terdorong oleh kebutuhan simplifikasi pembukuan yayasan.	Efisiensi administrasi meningkat di kedua sektor meski kendala teknis tetap ditemukan.

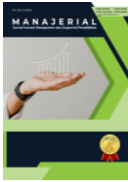
Sumber: Hasil sintesis analitis komparatif peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa perbedaan fundamental pelaporan dana BOS digital tidak terletak pada fungsionalitas sistem aplikasi, melainkan pada ekosistem kelembagaan tempat sistem tersebut dioperasikan. Sekolah negeri memposisikan pelaporan digital sebagai instrumen kepatuhan birokratis mutlak guna menghindari temuan audit pemeriksa keuangan negara. Sebaliknya, sekolah swasta memposisikan sistem digital sebagai sarana rekonsiliasi antara ketentuan bantuan pemerintah dengan kebijakan otonom yayasan. Keragaman struktur ini membuktikan bahwa penyeragaman aplikasi digital menghasilkan respons manajerial yang berlainan pada masing-masing jenis sekolah.

Pembahasan

Digitalisasi pelaporan dana BOS melalui aplikasi terpadu seperti ARKAS dan BOS Online terbukti merevolusi sistem administrasi pembiayaan pada satuan pendidikan di Indonesia. Temuan dari literatur yang dianalisis menegaskan bahwa integrasi data transaksi belanja ke dalam basis data digital secara nyata mereduksi duplikasi pembukuan dan meminimalisasi kesalahan perhitungan manual (Grediani et al., 2024; Setiyono et al., 2025). Transisi ini mengubah pola kerja bendahara sekolah dari pengarsipan nota berbasis kertas menjadi verifikasi berkas digital yang tersistematisasi. Namun demikian, perubahan ini menuntut adaptasi kelembagaan yang cepat agar operasionalisasi sistem tidak sekadar memindahkan beban administrasi manual ke format elektronik tanpa perbaikan tata kelola (Mubarok et al., 2025; Rusmiyati et al., 2025).

Efisiensi pembukuan yang dihadirkan oleh sistem digital terbukti memberikan implikasi positif terhadap kecepatan verifikasi anggaran di tingkat dinas pendidikan. Informasi anggaran yang diunggah secara berkala memudahkan tim manajemen BOS daerah dalam memantau tren realisasi belanja modal maupun belanja operasional sekolah (Fitri et al., 2023; Wulandari et al., 2025). Hal ini sejalan dengan premis bahwa manajemen pembiayaan yang efektif



membutuhkan instrumen pengendalian yang mampu menyediakan data akurat secara tepat waktu (Andriani et al., 2025; Mangkuwinata et al., 2026). Meskipun demikian, efisiensi tersebut kerap tereduksi ketika sistem aplikasi mengalami pembaruan versi (*update*) yang tidak diiringi kestabilan peladen (*server*) pusat, sehingga menghambat proses finalisasi laporan di tingkat sekolah.

Kajian komparatif terhadap 20 artikel empiris menunjukkan divergensi yang jelas antara transparansi administratif dan transparansi publik pada kedua jenis sekolah. Pada sekolah negeri, transparansi pelaporan dana BOS digital cenderung bersifat vertikal-administratif, yakni keterbukaan pertanggungjawaban kepada otoritas dinas pendidikan dan lembaga pemeriksa resmi (Dewi, 2025; Fadlika et al., 2024). Akses publik dan komite sekolah terhadap rincian penggunaan anggaran sering kali masih terbatas pada ringkasan global yang dipublikasikan secara formalitas (Nailah et al., 2025). Sebaliknya, pada sebagian sekolah swasta, keterbukaan informasi anggaran dituntut lebih fleksibel karena keterlibatan langsung orang tua murid dalam pembiayaan yayasan melalui iuran komite atau sumbangan pembinaan pendidikan (Bakti, 2020; Hakim & Enjelita, 2025).

Dimensi akuntabilitas dan pengendalian internal menunjukkan pola penerapan yang berbeda akibat disparitas struktur hukum kelembagaan. Sekolah negeri terikat secara ketat pada regulasi petunjuk teknis penggunaan BOS kementerian serta sistem kodifikasi belanja daerah yang kaku (Anggina et al., 2024; Aprilita & Saptantinah, 2025). Kepatuhan hukum ini menjadikan akuntabilitas sekolah negeri sangat terstandar, namun memiliki ruang diskresi yang sangat sempit dalam merespons kebutuhan darurat sekolah (Hakim & Suhendar, 2020). Di pihak lain, sekolah swasta menghadapi tuntutan akuntabilitas ganda (*dual accountability*), yakni kewajiban mempertanggungjawabkan dana BOS kepada pemerintah sesuai juknis negara sekaligus melaporkan kinerja keuangan kepada badan pengurus yayasan (Bakti, 2020; Syifa, 2025).

Kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi teridentifikasi sebagai faktor penentu paling dominan dalam efektivitas pelaporan digital. Keterbatasan literasi komputer bendahara dan lambatnya koneksi internet di daerah non-perkotaan menjadi kendala klasik yang dialami baik oleh sekolah negeri maupun swasta (Hasmawati et al., 2021; Wulandari et al., 2025). Pelatihan teknis operasional yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan terbukti berkorelasi positif dalam meningkatkan kepatuhan dan keandalan pelaporan anggaran sekolah (Firmansyah et al., 2024). Kendati demikian, sekolah swasta dengan kapasitas finansial mandiri yang terbatas sering kali mengalami kendala rotasi bendahara sekolah yang tinggi, sehingga kesinambungan penguasaan sistem digital ARKAS kerap terputus di tengah jalan (Munawwarah et al., 2026; Putri, 2025).

Sintesis komparatif dari keseluruhan literatur menegaskan bahwa pemanfaatan peranti digital yang seragam tidak otomatis melahirkan praktik tata kelola yang homogen. Perbedaan kultur manajerial, independensi finansial, serta mekanisme intervensi yayasan menjadikan implementasi ARKAS pada sekolah swasta lebih bervariasi dibandingkan pola birokratis sekolah negeri (Marliana et al., 2025; Mangkuwinata et al., 2025; Nurlisma et al., 2026). Oleh karena itu, standardisasi pelaporan digital perlu diimbangi dengan regulasi yang mengakomodasi keragaman karakteristik kelembagaan satuan pendidikan. Transformasi digital pembiayaan pendidikan hanya akan mencapai titik optimal apabila sistem teknologi diintegrasikan secara harmonis dengan penguatan kapasitas personalia, stabilitas sarana pendukung, dan penegakan akuntabilitas publik yang substantif.



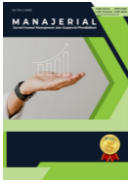
KESIMPULAN

Berdasarkan sintesis komparatif terhadap 20 artikel ilmiah empiris, dapat disimpulkan bahwa pelaporan dana BOS berbasis digital melalui sistem seperti ARKAS dan BOS *Online* beroperasi secara berbeda dalam konteks kelembagaan sekolah negeri dan swasta. Sekolah negeri menunjukkan pola pelaporan yang lebih formal, kaku, dan terstandar tinggi karena keterikatan hierarkis pada prosedur birokrasi pemerintah daerah serta pengawasan ketat dari inspektorat. Sebaliknya, sekolah swasta memiliki fleksibilitas operasional yang lebih dinamis dalam penyesuaian belanja internal, namun menghadapi tantangan akuntabilitas ganda kepada pemerintah dan badan penyelenggara yayasan. Meskipun digitalisasi terbukti meningkatkan efisiensi pembukuan dan keterlacakan data transaksi pada kedua entitas, transparansi yang tercipta masih dominan bersifat vertikal-administratif kepada otoritas pembina dan belum sepenuhnya menjangkau keterbukaan publik yang substantif bagi orang tua serta masyarakat. Keberhasilan implementasi pelaporan digital pada kedua jenis sekolah pada akhirnya sangat ditentukan oleh kesiapan kompetensi literasi digital pengelola, komitmen kepemimpinan sekolah, stabilitas infrastruktur jaringan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.

Implikasi kebijakan dari kajian ini menekankan perlunya kementerian pembina dan dinas pendidikan untuk merancang skema pendampingan teknis pelaporan digital yang adaptif terhadap perbedaan karakteristik kelembagaan antara sekolah negeri dan swasta. Sekolah swasta skala kecil membutuhkan afirmasi bantuan infrastruktur peranti dan pelatihan berkala guna mengatasi kendala pergantian operator sekolah. Bagi pengelola sekolah negeri, disarankan untuk memperluas akses transparansi informasi alokasi belanja BOS kepada komite sekolah dan masyarakat guna memperkuat legitimasi publik. Untuk penelitian di masa depan, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan studi lapangan komparatif secara kuantitatif atau *mixed methods* guna menguji dampak langsung adopsi ARKAS terhadap efisiensi belanja sekolah secara longitudinal, serta menganalisis efektivitas pengawasan komite sekolah dalam ekosistem pelaporan keuangan digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, N., Nursaidah, N., Athi, F. U. R., Al Kahfi, S., & Nisa, F. I. (2025). Manajemen pembiayaan pendidikan: Evaluasi model pengelolaan pembiayaan dana BOS. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(3), 112–125. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i03.29563>
- Anggina, L., Kurniati, M., & Pebriani, A. R. (2024). Pengelolaan manajemen keuangan: Prioritas, evaluasi dan akuntabilitas di SMAN 9 Bandung. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 3(4), 201–213. <https://doi.org/10.58192/populer.v3i4.2817>
- Aprilita, R., & Saptantinah, D. (2025). Managing BOS fund: The role of transparency, IT, and accountability in Surakarta school. *Equity*, 6(1), 45–58. <https://doi.org/10.46821/equity.v6i1.681>
- Bakti, S. (2020). Efektivitas pendayagunaan biaya Bantuan Operasional Sekolah dalam anggaran kualitas pendidikan sekolah dasar swasta dan negeri. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 6(1), 78–86. <https://doi.org/10.30596/edutech.v6i1.4398>
- Batubara, E. D., Nursidin, M., Sijauta, D., Ventiany, D., & Hasan, T. (2025). Improving BOS fund accountability through ARKAS, internal control and strengthened by transparency. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 15(4), 512–526. <https://doi.org/10.22219/jrak.v15i4.42217>



- Dewi, L. B. (2025). Pengaruh pengendalian internal, transparansi dan akuntabilitas terhadap efektivitas penggunaan dana BOS (Studi kasus pada sekolah SMPN/MTsN di Kabupaten Aceh Tenggara). *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 8(1), 935–951. <https://doi.org/10.38035/rrj.v8i1.1941>
- Fadlika, F., Siraj, S., & Mukhlisuddin, M. (2024). Manajemen kepala sekolah dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri. *Research and Development Journal of Education*, 10(1), 1443–1455. <https://doi.org/10.30998/rdje.v10i1.26579>
- Firmansyah, D., Ulhaq, M. Z., & Diah, M. (2024). Pengaruh pelatihan dan kejelasan tujuan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bireuen (Studi kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen). *Lentera: Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial dan Budaya*, 8(4), 310–322. <https://doi.org/10.31004/lentera.v8i4.1892>
- Fitri, N., Raza, H., Satria, D. I., & Arliansyah. (2023). Pengaruh penerapan *good school governance* terhadap pengelolaan keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan transparansi sebagai variabel moderasi (Studi pada SMAN di Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang). *Jurnal Akuntansi Malikussaleh*, 2(4), 523–537. <https://doi.org/10.29103/jam.v2i4.11592>
- Grediani, E., Setyana, Z. W., & Saputri, E. R. (2024). Prosedur pelaporan dana BOS di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 7(6), 8412–8424. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i6.13167>
- Hakim, D. R., & Suhendar, D. (2020). Evaluasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (Studi komparatif pada SMK Negeri dan Swasta di Provinsi Banten). *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi*, 17(1), 11–23. <https://doi.org/10.25134/equi.v17i1.2598>
- Hakim, M. N. F., & Enjelita, F. (2025). Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana BOS di sekolah dan madrasah. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Riset*, 1(1), 34–46. <https://doi.org/10.59175/jppr.v1i1.548>
- Hasmawati, H., AR, M., & Usman, N. (2021). Financing management of School Operational Fund (BOS) in improving learning at Babahrot State Junior High Schools (SMPN) of Southwest Aceh Regency. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, 24(2), 206–214. <https://doi.org/10.24252/lp.2021v24n2i4>
- Imeldania, P. S., Cahyaningdyah, D., & Martono, S. (2026). Problematika pengelolaan pembiayaan pendidikan di Indonesia: *Systematic literature review*. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD*, 12(3), 1420–1435. <https://doi.org/10.36989/didaktik.v12i03.16559>
- Mangkuwinata, S. M. I., Nova, A., Buchari, B., Rahmawaty, F., & Suriyani. (2025). Models of financing in education. *Journal Informatic, Education and Management (JIEM)*, 7(2), 473–478. <https://doi.org/10.61992/jiem.v7i2.158>
- Mangkuwinata, S. M. I., Wardhani, S., Tanjung, R., Wardah, & Muhtaram, S. A. (2026). Educational financing management for the enhancement of education quality. *Journal Informatic, Education and Management (JIEM)*, 8(1), 17–24. <https://doi.org/10.61992/jiem.v8i1.172>
- Marliana, M., Yunitawati, Y., & Mangkuwinata, S. M. I. (2025). Perbandingan model pembiayaan pendidikan antara negara berkembang dan negara maju: Kajian



- literatur sistematis. *Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 6(3), 215–228. <https://doi.org/10.59698/afeksi.v6i3.476>
- Mubarak, Y., Sulistiyarini, & Basri. (2025). Transformasi digital aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan sekolah. *JIGE: Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(4), 1820–1831. <https://doi.org/10.55681/jige.v6i4.4557>
- Munawwarah, M., Maharany, S., Zulkarnain, Z., Rizal, S., Nurhafdar, N., & Mangkuwinata, S. M. I. (2026). Inovasi pembiayaan pendidikan berbasis teknologi informasi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(4), 2365–2369. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6044>
- Nadir, & Karim, H. A. (2025). Accountability and transparency in education financing management. *ICMIE Proceedings*, 2, 256–263. <https://doi.org/10.30983/icmie.v2i1.64>
- Nailah, H., Idrus, M., & Nuraisyiah. (2025). Analisis transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan dana BOS di SMK Negeri 2 Pangkep tahun 2023. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 6(1), 88–97. <https://doi.org/10.24905/mlt.v6i1.225>
- Nurlaili, N., Anita, A., Jamil, R., Batu Bara, A., & Mangkuwinata, S. M. I. (2026). Pentingnya manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu pendidikan: Sebuah kajian literatur. *Jurnal Pustaka Cendekia Pendidikan*, 3(3), 417–425. <https://doi.org/10.31004/jpcp.v3i3.1450>
- Nurlisma, N., Salmiati, S., Amelia, S. R., Mariana, M., Mardiah, A., & Mangkuwinata, S. M. I. (2026). Analisis manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar. *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 5(1), 64–70. <https://doi.org/10.56127/jushpen.v5i1.2692>
- Putri, R. (2025). Ekonomi politik pendanaan pendidikan Islam: Analisis alokasi dana BOS madrasah 2015–2025. *AN-NUR: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 1(2), 284–298. <https://doi.org/10.65802/an-nur.v1i2.55>
- Ramadhan, R., Karim, H. A., & Ridwan, M. (2026). Accountability in education funding to achieve transparent and effective education governance. *El-Rusyd: Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah*, 11(1), 77–89. <https://doi.org/10.58485/elrusyd.v11i1.711>
- Rusmiyati, L., Abdullah, R., Zulaikha, S., & Takdir, M. (2025). Transformasi manajemen keuangan sekolah di era digital: Kajian literatur. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(4), 1120–1132. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1428>
- Setiyono, J., Munir, M., Kurniady, D. A., & Kurniatun, T. C. (2025). Management of BOS funds using the School Activity and Budget Plan Application (ARKAS) at public junior high schools in Majalengka Regency. *JMSP: Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, 9(3), 289–301. <https://doi.org/10.17977/um025v9i12024p273>
- Syifa, F. N. (2025). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan fleksibilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS dengan ARKAS sebagai variabel moderasi (Studi empiris pada SD Negeri dan Swasta di Kecamatan Batam Kota). *Zuang: Jurnal Akuntansi*, 14(2), 105–118. <https://doi.org/10.37776/zuang.v14i2.1693>
- Wulandari, S., Ramadhani, C. N., Zulkarnain, T., Ramadhan, S., & Damanik, P. S. (2025). Implementasi sistem BOS online dalam meningkatkan transparansi manajemen keuangan sekolah (Studi kasus pada SMA Negeri di Aceh Utara). *Jurnal Ecoment Global*, 10(3), 221–228. <https://doi.org/10.36982/jeg.v10i3.6529>